

2022

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pencapaian sampai dengan bulan Desember dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan Anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2022, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN


MAWARD FROSKA, S.IP
Pembina Utama Madya
Nip.19670907 198902 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah yang terukur dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mencapai peningkatan kinerja menjadi lebih baik

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah fungsi utamanya sebagai koordinator dalam melaksanakan program-program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah adalah kegiatan yang bersifat rutinitas dan ada beberapa program atau kegiatan yang sifatnya sekali jalan. Dengan demikian penetapan sasaran dan target pada Indikator Kinerja Utama bukanlah merupakan akumulasi kinerja selama tahun renstra yaitu tahun 2021 s/d 2026, namun merupakan sasaran dan target untuk pelaksanaan satu tahunan.

Dari 6 point Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik pada kondisi berhasil. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah kedepan adalah Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun untuk masa yang akan datang perlu dilakukan penyempurnaan IKU supaya lebih fokus pada tupoksi Sekretariat Daerah dalam menunjang pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua, Perlu dirumuskan kembali program-program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target sasaran dengan mengefisienkan jumlah program dan kegiatan yang fokus pada pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	01
B. Maksud dan Tujuan	02
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	03
D. Identifikasi Permasalahan	05
E. Isu Strategis	06
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	08
B. Perjanjian Kinerja	09
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah tahun 2022. Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Laporan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban ke Bupati atas capaian Kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di tahun 2022
2. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

3. Memberikan informasi perkembangan realisasi an keuangan dan fisik kegiatan yang dikelola Sekretariat Daerah
4. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
5. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
6. Proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Tujuan Laporan

Laporan kinerja Sekretariat Daerah bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati dalam Kedudukan dan Susunan Organisasi, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang saat ini dipimpin oleh Mawardi Roska, S.IP.

Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bapak Bupati.

Tugas

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Sekretariat Daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Untuk melaksanakan fungsi diatas, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut;

1. Penyusunan Pola Dasar, Visi, Misi pedoman dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Keuangan Sekretariat Daerah;
3. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD Sekretariat Daerah;
4. Menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM) SKPD Sekretariat Daerah;
5. Membuat Laporan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan untuk memfasilitasi bidang tugas Pemerintahan Daerah.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan ; dan
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah didukung oleh 192 Pegawai yang terdiri dari 114 orang Pegawai PNS dan 78 Pegawai Non PNS sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural Eselon II.A	1 Orang
2.	Pejabat Struktural Eselon II.B	6 Orang
3.	Pejabat Struktural Eselon III.a	10 Orang
4.	Pejabat Struktural Eselon IV.a	1 Orang
5.	Fungsional Tertentu	29 Orang
6.	Fungsional Umum (PNS)	67 Orang
7.	Staf Pelaksana (Kontrak)	78 Orang
	JUMLAH	192 Orang

Tabel 2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	28 Orang
2.	Golongan III	66 Orang
3.	Golongan II	20 Orang
4.	Golongan I	0 Orang
5.	Non PNS	78 Orang
	JUMLAH	192 Orang

Tabel 3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S2	26 Orang
2.	S1	65 Orang
3.	DIII	5 Orang
4.	SLTA	17 Orang
5.	SLTP	1 Orang
	JUMLAH	114 Orang

D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Kurangnya pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Belum tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data - data kepegawaian serta arsip – arsip kepegawaian secara *on line / komputerisasi*.
3. Kurangnya pengendalian dari beberapa PPTK terkait pengelolaan laporan kemajuan fisik kegiatan yang menyebabkan keterlambatan laporan di Sekretariat Daerah
4. Masih belum memadainya sarana jaringan yang ada dalam rangka mendukung pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat Daerah
5. Belum adanya prosedur dan aturan yang dihasilkan tim tentang kebijakan dan pengawasan jasa konstruksi.
6. Pemberian bonus, honor peserta dan pelatih pelaksana MTQ Provinsi masih terlalu kecil.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara penyaluran hibah dan bantuan sosial lainnya yang tersedia pada anggaran Sekretariat Daerah.
8. Belum terlaksananya validasi terhadap data guru TPA/TPQ dan MDTA
9. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya kegiatan penyusunan LPPD.

10. Masih kurangnya kesadaran aparatur dalam penegakan disiplin untuk mengikuti apel pagi serta upacara hari besar lainnya.
11. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan.

E. Isu Strategis

Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
3. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
4. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
6. Menekan dampak permasalahan budaya masyarakat dengan peningkatan aktivitas perekonomian berbasis pariwisata yang menjadikan kunjungan wisatawan sebagai sumber pemasukan PAD sehingga akan meningkatkan Pendapatan dan meningkatkan alokasi anggaran belanja kegiatan.
7. Pengembangan sarana dan prasara penunjang daerah untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan dan meminimalisir dampak negative atau pengaruh buruk akibat kedatangan wisatawan tersebut.
8. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
9. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
10. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.

11. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada misi 1 dan misi 5 sebagaimana yang tertuang pada RPJMD 2021 - 2026 sebagai berikut :

- a. Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- b. Misi 5 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Tabel 4

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,00 (BB)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)
		Skor Nilai LPPD	3,2090	3,2150	3,2230	3,2290	3,2340	3,2400
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	80.00	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00
4	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%
		Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	Sedang (11 s/d 20 Orang)	Sedang (11 s/d 20 Orang)	Tinggi (≥ 21 Orang)	Tinggi (≥ 21 Orang)

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja Sekretaria Daerah tahun 2022 berpedoman kepada pada Revisi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70,00 (BB)	72,00 (BB)	
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 (B)	84 B)	
		Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	80%	80%	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
		Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Org	114 Org	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Jumlah ASN yang menerima honor pengelola keuangan Sekretariat Daerah	18 Orang	18 Orang	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	12 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

					Kantor
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 kali	150 kali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Arsip	1500 Arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	15 Unit	15 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	Pengadaan Mebel
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	1500 Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	85 unit	85 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah mobil jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit Mobil/48 Unit Motor	33 Unit Mobil/48 Unit Motor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	Pemeliharaan Mebel
		Jumlah dana yang tersedia untuk biaya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 bulan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	70 Stel	70 Stel	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 pemeriksaan	2 pemeriksaan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumahtangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
		Jumlah dana Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Jumlah dana Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		Jumlah dana Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
		Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	Penataan Organisasi
		Jumlah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati	1 Perda, 1 Perbub	1 Perda, 1 Perbub	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah rancangan	10 Ranperbub	10 Ranperbub	Pengelolaan

		peraturan kepala daerah dan peraturan bupati			Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah OPD yang melakukan penyusunan penataan jabatan perangkat daerah	40 OPD	40 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah OPD yang dievaluasi terhadap system informasi pelayanan publik	42 OPD	42 OPD	Fasilitas pelayanan publin dan tata laksana
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Fasilitasi kompetisi, inovasi, Pelayanan Publik	3 Inovasi	3 Inovasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan untuk Peta Proses Bisnis	42 OPD	42 OPD	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Jumlah cakupan nilai Reformasi Birokrasi yang ditargetkan setiap tahun	B	B	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Jumlah OPD yang di Monitoring dan diEvaluasi terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan	3 OPD	3 OPD	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Nilai LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	B	B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja	12 Bulan	12 Bulan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi

		sama media			Pimpinan
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Keprotokolan untuk pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	Fasilitasi Keprotokolan
		Jumlah kegiatan Pimpinan di berbagai media masa yang diliput	28 Media	28 Media	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Jumlah peliputan pembuatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	180 liputan dan dokumentasi	180 liputan dan dokumentasi	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Persentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	100%	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	100%	100%	Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah Penyelenggaraan Rakor Gubernur dengan Kab/kota	4 Kali	4 Kali	Administrasi Tata Pemerintahan
		Jumlah penyelesaian permasalahan di kecamatan yang di selesaikan	4 Kali	4 Kali	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Jumlah Kecamatan yang ikut penilaian kompetensi camat tingkat kabupaten dan tingkat propinsi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Persentase Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Kecamatan	100	100	Penataan Administrasi Pemerintahan

		Jumlah Dokumen laporan, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban otonomi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk minhasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai nilai agama dalam kehidupan masyarakat	100%	100%	
	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di masjid/mushala	90%	90%	
		Persentase Pemenuhan kewajiban membayar zakat	96,40%	96,40%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	79 Kali	79 Kali	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah ceramah agama yang dilakukan	22 kali	22 kali	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah Haji yang difasilitasi	150 orang	150 orang	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental

					Spiritual
		Jumlah kecamatan yang memiliki Lembaga pendidikan subuh yg dibina	15 kecamatan	15 kecamatan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah koordinasi konsultasi kesra dan urusan keagamaan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Tingkat Provinsi	7 Mesjid	7 Mesjid	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Safari Pemda yang dilakukan	55 kali	55 kali	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Jumlah kecamatan yang mendapat bantuan social kepada masyarakat yang terkena bencana alam	15 kecamatan	15 kecamatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Jumlah mahasiswa pengembangan kampus UNP di Pesisir Selatan (biaya Pendidikan) yang dibantu	125 mahasiswa	125 mahasiswa	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	100%	100%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 dokumen	500 dokumen	Fasilitasi Penyusunan Produk

					Hukum Daerah
		Jumlah laporan Data KKP HAM dan Aksi Ham B4, 88, B12	10 laporan	10 laporan	Fasilitasi Bantuan Hukum
		Jumlah perkara Hukum Pemda yang diselesaikan	3 perkara	3 perkara	Fasilitasi Bantuan Hukum
		Jumlah berita daerah yang dipublikasikan	50 buku	50 buku	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah daerah yang dipublikasikan	250 buku	250 buku	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	5 MOU	5 MOU	Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 MOU	5 MOU	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

					BUMD dan BLUD
		Jumlah Laporan Pelaksanaan pengawasan Pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Laporan	1 Laporan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Persentase penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	100%	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
		Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah Buku ASB yang Dicitak	60 Buku	60 Buku)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD yang Dicitak	75 Buku	75 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Buku susdur yang Dicitak	75 Buku	75 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah Buku harga satua yang Dicitak	45 Buku	45 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Jumlah koordinasi pembangunan daerah yang dilakukan	8 kali	8 kali	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

		Jumlah Buku Laporan pelaksanaan pembangunan daerah yg dicetak	96 buku	96 buku	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		Persentase Proses Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	100%	100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah paket proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan aturan yang berlaku serta tersedianya perangkat dan system untuk pengadaan barang dan jasa	100 paket	100 paket	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Jumlah OPD yang difasilitasi Pengadaan Secara Elektronik	41 Dokumen	41 Dokumen	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
		Jumlah personal yang mengisi jabatan fungsional dan pengembangan kompetensi pengadaan barang dan jasa serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang	4 Orang	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,	100%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

		Tenaga Kerja			
		Persentase pelaksanaan Koordinasi pengawasan usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi	100 %	100 %	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi, pengawasan yang menggunakan air tanah	15 kecamatan	15 kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Sekretariat Daerah bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2022			
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	70,00 (BB)	70,00 (BB)	68.00(B)	80%	cukup Berhasil
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	82	82	B (82.00)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,50%	96,50%	96,50%	100%	Sangat Berhasil
Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2022			
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	100%	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai ukuran keberhasilan dari Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang merupakan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 7

Realisasi IKU Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian %	Predikat
			Satuan	Tahun 2022			

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	70,00 (BB)	70,00 (BB)	68.00(B)	80%	cukup Berhasil
	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3,215	3,215	3,2090	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukup Efektif)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	82	82	B (82.00)	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,50%	96,50%	96,50%	100%	Sangat Berhasil
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tingkat Partisipasi	100%	Rendah (≤ 10 Orang)	Rendah (≤ 10 Orang)	100%	Sangat Berhasil

2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan Target Kinerja 2022

Realisasi kinerja sasaran Tahun 2022 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun (2022) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2022) dalam mengetahui kemampuan Sekretariat Daerah untuk mencapai target sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 8

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan Target Sasaran Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Penghitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	68,00 (B)	70,00 (BB)
	Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai	3,2090	3,2150
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	Nilai	P-3 (Cukup Efektif)	P-3 (Cukp Efektif)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	Nilai	82	82
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	Persentase	96,50%	96,50%
	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Persentase	100%	Rendah (\leq 10 Orang)	Rendah (\leq 10 Orang)

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai Anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengelola anggaran dengan realisasi sebesar **Rp. 32.181.238.464,-** atau **94,86 %** dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp. 33.925.717.877,00** sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah. Maka khusus belanja KDH terealisasi sebesar Rp. **472.299.373,-** atau **91,94 %** dari anggaran **Rp. 513.676.672,-** Rincian lengkap untuk belanja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Realisasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	13.904.234.720,-	13.558.266.258,-	97.51

Belanja Barang dan jasa	14.703.496.877,-	13.655.707.756,-	92,87
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,-	0	0
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.	4.134.500.000,-	3.983.000.000,-	96,34
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	188.250.000,-	187.583.000,-	99,65
Belanja Modal	920.236.280,-	796.681.450,-	86,57
JUMLAH	33.925.717.877,-	32.181.238.464,-	94.86

Dari belanja pegawai yang dianggarkan sebesar **Rp. 13.904.234.720,-** terealisasi sebesar **Rp. 13.558.266.258,-** atau **97,51 %**. Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp **14.703.496.877,-** terealisasi sebesar **Rp. 13.655.707.756,-** atau **92,87 %**. sedangkan untuk belanja hibah sebesar **Rp. 4.397.750.000,-** terealisasi sebesar **4.170.583.000,-** Atau **94,83 %** sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar **Rp. 920.236.280,-** terealisasi sebesar **Rp 796.681.450,-** atau **86,57 %**. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan Belanja Langsung, Sekretariat Daerah melaksanakan **3 program dan 19 kegiatan**.

Tabel dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	68,00 (B)				
	SKOR LPPD	3,2150				
	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	P-3(Cukup Efektif)				
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	82				
		100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.641.989.361	23.789.545.542	92,78 %
		100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.211.783.977	187.914.846	99,31 %
		100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.783.977	217.455.069	97,50 %
NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		124 Org	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.438.303.318	12.142.816.885	97,62
		12 bulan	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	513.676.672	472.299.373	91,94
		4 Dokumen	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.211.390	187.914.846	99,31
		12 bulan	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	90.538.364	89.314.504	98,65
		100%	5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.655.104	148.013.150	99,96
		100%	Administrasi Umum Perangkat	1.527.291.060	1396.737.269	99,11 %

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		12 bulan	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	82.116.630	82.048.000	99,92
		12 bulan	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.249.700	29.194.870	99,81
		12 bulan	8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	239.856.600	238.399.900	99,39
		12 bulan	9 Fasilitasi Kunjungan Tamu	274.025.000	197.000.244	71,89
		12 bulan	10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	843.511.650	791.668.155	93,85
		1500 Arsip	11 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58.531.480	58.426.100	99,82
		15 Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.997.680	515.940.500	78,65 %
		7 Unit	12 Pengadaan Mebel	289.921.400	230.125.000	79,37
		8 Unit	13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	366.076.280	285815.500	78,08
		12 Bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.310.667.580	2.138.215.201	92,54
		1500 surat	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.151.930	70.422.300,-	98,97
		12 Bulan	15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.170.065.650	1.004.813.741	85,88
		12 Bulan	16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000.	47.947.000	99,89
		40 orang	17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.021.450.000,-	1.015.032.160	99,37
		85 unit	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.569.762.830	2.299.554.363	89,49
		4 Unit	18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	564.315.480	465.611.417	82,51

			Dinas Jabatan			
		33 Unit Mobil/48 Unit Motor	19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	937.372.470	835.217.074	89,10
		15 Unit	20 Pemeliharaan Mebel	9.300.000,-	8.864.000	95,31
		12 Bulan	21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.200.000,-	101.810.000	89,15
		2 Unit/12 bulan	22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.574.880	177.714.580	93,74
		2 Unit	23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	755.000.000	710.337.293	94,08
		12 Bulan	24 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.407.431.402	886.559.196	62,99
		70 stel	25 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	256.000.000	255.705.515	99,89
		2 Orang	26 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80.000.000	73.102.681	91,38
NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		±400 Org	27 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	557.754.730	557.750.000	100,
		12 Bulan	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.857.780.330	2.650.740.528	92,76
		12 Bulan	28 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.520.497.470	1.468.478.829	96,58
		12 Bulan	29 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.004.267.720	946.857.351	94,28

		12 Bulan	30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	333.015.140	235.404.350	70,69
		100%		Penataan Organisasi	366.387.148	2.650.740.528	96,09
		1 Perda dan 1 Perbub	31	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	87.431.620	81.324.790	93,02
		42 OPD	32	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106.743.800	103.703.860	97,15
		B	33	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	93.999.670	92.807.274	98,73
		B	34	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	78.212.058	74.218.310	94,89
		12 Bulan		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	913.717.542	853.544.300	96,94
		12 Bulan	35	Fasilitasi Keprotokolan	112.329.162	100.844.800	89,78
		28 Media massa	36	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	637.398.620	602.165.800	94,47
		12 Bulan/180 Liputan dan dokumentasi	37	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	163.989.760	150.533.700	91,79
		100%		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	7.197.686.744	6.899.225.934	95,85
		100%		Administrasi Tata Pemerintahan	220.319.044	219.089.070	99,44
NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2022		PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		4 kali	38	Penataan Administrasi Pemerintahan	44.619.118	44.296.730	99,28
		5 Dokumen	39	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	66.035.288	65.785.840	99,62
		1 Dokumen	40	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.664.638	109.006.500	99,40
	Meningkatn ya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	96,50%					
		79 Kali		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	6.689.311.928	6.410.416.344	95,83

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
		22 kali	41 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.236.407.818	6.064.742.374	97,25
		15 kecamatan	42 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	62.644.520	57.678.570	92,07
		125 mahasiswa	43 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	390.259.590	287.995.400	73,80
		12 Bulan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	242.581.628	224.509.600	92,55
		500 dokumen	44 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	94.249.992	83.482.840	88,58
		10 buku laporan	45 Fasilitasi Bantuan Hukum	84.977.536	83.276.610	98,00
		50 buku	46 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	63.353.500	57.750.150	91,16
		5 MOU	Fasilitasi Kerjasama Daerah	45.474.744	45.210.920	99,42
		5 MOU	47 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45.474.744	45.210.920	99,42
		100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.086.041.772	1.020.167.615	93,93
		100%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	298.542.490	262.173.181	87,82
		1 Laporan (Inflasi, TPAKD)	49 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	142.240.470	121.210.601	85,22
		100%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	231.816.368	208.414.056	91,81
		60 buku	51 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	78.400.596	66.452.454	84,76

		8 kali	52	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	96.097.072	85.329.832	88,30
		96 buku	53	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	57.318.700	56.631.770	98,80
		100%		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	404.539.724	402.348.120	99,46
		100 paket	54	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	166.728.620	165.524.396	99,28
		45 OPD	55	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	137.055.196	136.975.360	99,94
		4 Orang	56	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.755.908	99.848.364	99,10
		100%		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	151.143.190	147.232.258	97,41
		100%	57	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	151.143.190	147.232.258	97,51
				JUMLAH	33.925.717.877	32.181.238.464	94,86

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas public serta keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, berdasarkan data yang telah diuraikan dalam LKj ini pencapaian target akhir Renstra Sekretariat Daerah secara umum adalah sangat baik karena telah memenuhi indikator sasaran yang telah ditetapkan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja tahun 2022, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah ini dibuat, semoga dapat dijadikan salah satu bahan informasi dalam pembuatan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

